

# MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAHAN DI INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Siti Halimah\*

## Abstract

*The paper highlights Islamic education in Indonesia that can be classified into three kinds. First, Islamic education as an institution with Islamic education recognized by the government. Second, Islamic education as a subject given from elementary school to college level. Third, Islamic education as a value in the national education system. When Islam came to Indonesia, it directly and indirectly has been in contact with the government or the policy of the Indonesian authorities. This more or less already affects the growth, development and advancement of Islamic education in Indonesia. The culmination of the government's acknowledgment of the existence of Islamic education is Law No. 20 Year 2003 on National Education System, which regulates the implementation of a national education system as desired by the 1945 Constitution that integrates Islamic education into the national education system.*

**Key words:** *Management, Politics, government, PAI*

---

\* Dosen STIT Pasuruan email: [chmaniez89@gmail.com](mailto:chmaniez89@gmail.com)

## الملخص

يتناول هذا البحث عن التربية الإسلامية بإندونيسيا التي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: الأولى: التربية الإسلامية كمؤسسة معترفة من قبل الحكومة. والثانية: التربية الإسلامية كهادة، حيث أوجبت الحكومة اتخاذ مادة التربية الإسلامية في كل مراحل التعليم من التعليم الابتدائي إلى التعليم الجامعي. والثالثة: التربية الإسلامية كقيمة، حيث توجد القيم الإسلامية في نظام التربية الوطنية. عندما دخل الإسلام في إندونيسيا، اتصل بسياسة الحكومة الإندونيسية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. وتؤثر تلك السياسة نشأة ونمو وتقدم التربية الإسلامية بإندونيسيا. وقمة اعتراف الحكومة الإندونيسية بكيان التربية الإسلامية تكمن في قانون رقم 20 سنة 2003 عن نظام التربية الوطنية التي تنظم عملية نظام التربية الوطنية الموحدة كما أرادها الدستور 1945. حيث يوحد هذا القانون التربية الإسلامية في نظام التربية الوطنية.

مفتاح الكلمات: الإدارة، السياسة، الحكومة، التربية الإسلامية

## Abstrak

*Tulisan ini menjelaskan pendidikan Islam di Indonesia yang terbagi menjadi tiga macam. Pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga dengan diakuinya pendidikan Islam oleh pemerintah. Ke dua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran dengan diberlakukannya pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang wajib diberikan mulai dari sekolah tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ke tiga, pendidikan Islam sebagai nilai dengan ditemukannya nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional. Begitu Islam masuk ke Indonesia, secara langsung atau tidak telah bersentuhan dengan kebijakan pemerintah atau penguasa Indonesia. Kebijakan tersebut sedikit atau banyak telah mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan pendidikan Islam di Indonesia. Puncak dari pengakuan pemerintah terhadap eksistensi pendidikan Islam terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional sebagaimana dikehendaki UUD 1945. UU tersebut mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional.*

**Kata kunci:** Manajemen, Politik, Pemerintahan, PAI

## Pendahuluan

Secara historis pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sangat terkait erat dengan kegiatan dakwah Islamiyah. Pendidikan Islam berperan sebagai mediator dimana ajaran Islam dapat disosialisasikan kepada masyarakat dalam berbagai tingkatannya.<sup>1</sup> Pendidikan Islam di Indonesia paling tidak telah mengambil bentuknya tersendiri pada tiga macam. Pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga dengan diakuinya pendidikan Islam oleh pemerintah. Ke dua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran dengan diberlakukannya pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang wajib diberikan mulai dari sekolah tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ke tiga, pendidikan Islam sebagai nilai dengan ditemukannya nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional.<sup>2</sup>

Tiga bentuk pendidikan Islam tersebut tidak terbentuk saja. Pendidikan Islam mengalami berbagai dialektika dengan serentetan kebijakan politik pendidikan di Indonesia. Begitu Islam masuk ke Indonesia, secara langsung atau tidak telah bersentuhan dengan kebijakan pemerintah atau penguasa Indonesia. Kebijakan tersebut sedikit atau banyak telah mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap Negara.<sup>3</sup>

Bertolak dari kerangka tersebut di atas, maka pendidikan Islam di Indonesia seringkali berhadapan dengan berbagai problema yang tidak ringan. Diketahui bahwa sebagai sebuah sistem pendidikan Islam mengandung berbagai komponen antara satu dan lainya saling berkaitan.<sup>4</sup> Adanya politik dalam pendidikan tentu berimplikasi pada kebijakan pendidikan Islam, dan inilah yang dikaji dalam tulisan ini.

## Manajemen

Banyak sekali definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli mengenai manajemen. Sebelum mengemukakan pengertian manajemen terlebih dahulu dikemukakan asal kata manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa

---

1 Abudin Nata, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 1.

2 Ibid., 4.

3 M. Sirozi, *Politik Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 1.

4 Sudirman, dkk., *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Remaja Karya, 1989), cet. I, 65.

Inggris dari kata kerja "to hand" berarti mengurus, "to control" berarti memeriksa, "to guide" berarti memimpin. Jadi apabila hanya dilihat dari asal katanya manajemen berarti pengurusan, pengendalian, memimpin atau membimbing.<sup>5</sup>

Dalam manajemen mengandung dua makna, ialah *Mind* (pikir) dan *Action* (tindakan), secara terminologis, manajemen berarti:

1. Kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencari tujuan,
2. Segenap perbuatan menggerakkan sekelompok orang untuk mengerahkan segala fasilitas dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan,
3. Bekerja dengan menggunakan atau meminjam tangan orang lain.<sup>6</sup>

Tiga pengertian ini memberikan isyarat adanya dua jenis pekerjaan, pekerjaan manajerial di satu pihak dan pekerjaan yang proses penyelesaiannya menggunakan tangan orang lain, menggunakan tangan sendiri. George Terry menyatakan bahwa definisi manajemen adalah suatu tindakan perbuatan seseorang yang berhak menyuruh orang lain mengerjakan sesuatu, sedangkan tanggung jawab tetap di tangan yang memerintah. Menurut Koonzt C.O. Donnell manajemen adalah usaha pertambahan fungsi-fungsi kegiatan untuk mencapai tujuan. Dari ke tiga pengertian tersebut mengenai masalah tanggung jawab, pembagian kerja, efisiensi. dikehendaki oleh sarjana yang mengemukakannya sesuai dengan pengertian yang terdapat pada ajaran Islam. Berikut ini dapat kita lihat mengenai kewajiban bertanggung jawab.<sup>7</sup>

(QS. Az-Zilzal : 7-8)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat Dzarrah-pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-Nya (7). Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar Dzarrah-pun, niscaya dia akan melihat (balasan)Nya pula (8).*<sup>8</sup>

5 Ek. Mochtar Effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarakan Ajaran Islam* (Jakarta: PT Bhratara Karya Aksara), 9.

6 Imron, dkk. *Manajemen Pendidikan Analisis dan Aplikasinya dalam Institusi Pendidikan* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003), 4.

7 Mochtar Effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarakan.*, 11.

8 Al-Qur'an al-Karim dan terjemah Bahasa Indonesia jus 30 (Semarang: Menara Kudus,

Manajemen didefinisikan oleh Nanang Fattah bahwa manajemen sebagai proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dan segala aspeknya agar tujuan organisasi dan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.<sup>9</sup> Sebagaimana Firman Allah QS.As-sajdah ayat 5:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ  
أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

*Artinya: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.*<sup>10</sup>

Q.S As-Shaff ayat 4

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُيُوتٌ مَرْصُوصَةٌ

*Artinya; Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*<sup>11</sup>

Adapun Hadis Nabi: yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ya'la:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ أَلَّا يَكُونَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ (روه مسلم)

*Artinya; Sesungguhnya Allah mewajibkan kita untuk berlaku ihsan terhadap segala sesuatu. (HR Muslim)*

Dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer/pimpinan, yaitu: perencanaan (*Planning*),

---

2006), 599.

9 Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), Cet VII, 1.

10 Al-Qur'an al-Karim dan terjemah Bahasa., 473.

11 Ibid., 654.

pengorganisasian (*Organizing*), pengarahan (*Actuating*), dan pengawasan (*Controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencana, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan supaya organisasi tercapai secara efektif dan efisien.<sup>12</sup>

### Politik Pendidikan

Kata Politik berasal dari bahasa Inggris, *Politics* yang berarti permainan politik.<sup>13</sup> Sedangkan dalam bahasa Indonesia, politik diartikan pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tatacara pemerintahan dan sebagainya, dan dapat berarti pula segala urusan dan tindakan, kebijaksanaan, siasat dan sebagainya, mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain.<sup>14</sup> Dalam bahasa Arab kata politik dikenal dengan istilah *siyasa* yang berarti cipta, upaya-upaya strategis dan pengaturan tentang sesuatu.<sup>15</sup>

Sedangkan kata pendidikan berasal dari kata didik yang mendapat awal pen- dan akhiran -an, dan berarti perbuatan, hal, cara, dan sebagainya mendidik, pengetahuan tentang mendidik, dan berarti pula pemeliharaan, latihan-latihan dan sebagainya yang meliputi badan, batin, dan sebagainya.<sup>16</sup> Kata pendidikan dalam bahasa Yunani, dikenal dengan *paedagogos* yang berarti menuntun anak. Dalam bahasa Romawi dikenal dengan *educare*, artinya membawa keluar, dalam bahasa Belanda menyebut istilah pendidikan dengan *opvoeden*, dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *education* yang artinya menanamkan moral dan melatih intelektual.<sup>17</sup> Dalam bahasa Arab kata pendidikan diwakili oleh kata *tarbiyah*, *ta'dib*, *ta'lim*, *tadris*, *tadzkiyah*, dan *tadzkirah* yang secara keseluruhan menghimpun kegiatan yang terdapat dalam pendidikan yaitu membina, memelihara, mengajarkan, menyucikan jiwa dan mengingatkan manusia terhadap hal-hal yang baik.<sup>18</sup>

12 Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, 1.

13 John M. Echols Shadily, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1980), cet. VIII, 437.

14 W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) cet. VII, 763.

15 Jamil Saliba, *Mu'jam al-falsafi* (Mesir: Dar al-Fikr, 1978) cet. VII, 45.

16 W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Umum*, 250.

17 Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993), 15.

18 H. Abudin Nata, *Manajemen*, 9.

Dengan demikian, politik pendidikan adalah segala usaha, kebijakan dan siasat yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Dalam perkembangan sejarahnya politik pendidikan adalah penjelasan atau pemahaman umum yang ditentukan oleh penguasa pendidikan tertinggi untuk mengarahkan pemikiran dan menentukan tindakan dengan perangkat pendidikan dalam berbagai kesamaan yang beraneka ragam beserta tujuan dan program untuk merealisasikannya.<sup>19</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Nata<sup>20</sup> politik pendidikan mengandung lima hal sebagai berikut:

1. Politik pendidikan mengandung kebijakan pemerintah suatu negara. Sebuah pemerintah Negara dalam berkomunikasi dengan rakyatnya biasanya menggunakan berbagai kebijakan. Kebijakan inilah yang kemudian dilaksanakan oleh seluruh abdi Negara dan masyarakat sesuai dengan bidangnya termasuk pendidikan.
2. Politik pendidikan bukan hanya berupa peraturan perundangan yang tertulis, melainkan juga termasuk kebijakan lainnya. Misalnya situasi dan kondisi sosial politik, budaya, keamanan dan hubungan pemerintah dengan dunia internasional. Meskipun kondisi tersebut tidak berkaitan secara langsung akan tetapi cukup berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pendidikan suatu Negara.
3. Politik pendidikan ditujukan untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan karena pemerintah memiliki infrastruktur dan suprastruktur yang lebih kuat dalam memikul tugas dan tanggung jawab terselenggaranya pendidikan, walaupun swasta juga ikut berperan di dalamnya.
4. Politik pendidikan dijalankan demi tercapainya tujuan Negara.
5. Politik pendidikan merupakan sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan suatu Negara.

### **Kebijakan Pendidikan**

*Wisdom* atau kebijakan adalah suatu kearifan pimpinan kepada bawahan atau masyarakatnya. Pimpinan yang arif dapat saja mengecualikan

---

19 Ibid., 9.

20 Ibid., 9-11.

aturan yang baku kepada seseorang atau sekelompok orang tersebut tidak dapat dan tidak mungkin memenuhi aturan yang umum tadi.<sup>21</sup> Menurut Slamet kebijakan pendidikan adalah apa yang dikatakan (diputuskan) dan dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan berisi keputusan dan tindakan yang mengalokasikan nilai-nilai. Kebijakan dibuat mengacu pada paradigma baru pendidikan.<sup>22</sup>

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada para manajer untuk bergerak. Kebijakan juga berarti suatu keputusan yang luas untuk menjadi patokan dasar bagi pelaksanaan manajemen. Keputusan yang dimaksud telah dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan yang berulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah upaya perbaikan dalam tataran konsep pendidikan, perundang-undangan, peraturan dan pelaksanaan pendidikan serta menghilangkan praktik-praktik pendidikan di masa lalu yang tidak sesuai atau kurang baik.<sup>23</sup> Kriteria Kebijakan Pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni:

1. Memiliki tujuan pendidikan

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.

2. Memenuhi aspek legal-formal

Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat.

---

21 Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 15.

22 [www.Analisis Kebijakan Pendidikan.com](http://www.AnalisisKebijakanPendidikan.com) diakses 20 September 2010

23 Ibid.

3. Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.

4. Dibuat oleh yang berwenang

Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.

5. Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki. Sehingga, kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadapnya secara mudah dan efektif.

6. Memiliki sistematika

Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Kebijakan pendidikan diperlukan agar tujuan pendidikan nasional dapat dicapai secara efektif dan efisien.<sup>24</sup>

---

24 [www.kebijakan-kebijakan-pendidikan.com](http://www.kebijakan-kebijakan-pendidikan.com) diakses 2 Oktober 2010

## **Kebijakan Politik tentang Pendidikan Islam pada Pemerintahan Indonesia**

Kebijakan politik pemerintahan di Indonesia secara umum dapat dibagi ke dalam empat periode:

### 1. Kebijakan politik pemerintah Indonesia pada masa Pra-kemerdekaan

Kebijakan politik pemerintahan Indonesia berada di tangan Belanda. Pada masa itu Belanda menerapkan politik deskriminatif terhadap rakyat jajahannya terutama terhadap umat Islam, yaitu pelit memberikan pendidikan. Belanda sengaja membiarkan rakyat jajahannya berada dalam kebodohnya, sehingga mudah dijajah. Hal itu berubah setelah Belanda mendapat tekanan dari dunia Internasional, Belanda memberikan kesempatan secara terbatas kepada bangsa Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Namun, tujuan dari pendidikan tersebut adalah untuk tenaga kerja yang akan dipekerjakan di pemerintahan Belanda, pada tahap selanjutnya dapat memperkokoh Belanda.<sup>25</sup>

Belanda sangat mencurigai dan tidak suka pada keberadaan pendidikan Islam yang diselenggarakan di Pesantren, Madrasah, karena dianggap pemberontak. Dalam keadaan demikian, maka politik yakni tidak mau bekerja sama dengan Belanda dan mengusir Belanda dengan mendorong para pelajar untuk berjuang melawan Belanda. Sejalan dengan itu, bangsa Indonesia, khususnya umat Islam menyelenggarakan kegiatan pendidikan sekolah sebagaimana dengan Belanda. Kegiatan ini dilaksanakan oleh organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nadhdatul Ulama, Persatuan Islam dan sebagainya. Di lembaga-lembaga Islam tersebut selain diberikan ilmu agama juga diberikan pengetahuan umum, rasa cinta tanah air.

Dengan demikian politik pendidikan Islam yang dilakukan pada masa pra kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh politik dan kebijakan pemerintahan pada masa itu, yakni pemerintah kolonialis Belanda. Politik pendidikan Islam yang diterapkan tokoh-tokoh pendidik pada masa itu, selain menyadarkan umat Islam tentang perlunya melakukan pembaharuan pendidikan Islam, juga ternyata berjasa dalam melahirkan kader-kader pemimpin bangsa yang berjiwa nasionalis, patriotis, dan kepribadian Indonesia.<sup>26</sup>

---

25 Abuddin Nata, *Manajemen*, 11.

26 *Ibid.*, 12.

## 2. Kebijakan politik pemerintah Indonesia pada masa Orde Lama

Pada masa ini politik pendidikan Islam lebih diarahkan pada upaya memperbaharui dan memperbanyak lembaga pendidikan Islam yang lebih bermutu sejalan dengan tuntutan. Namun keinginan ini belum terlaksana sepenuhnya, karena Indonesia baru saja merdeka. Selain itu adanya kekuatan ideologis yang mempengaruhi situasi politik dan kebijakan pemerintah juga ikut serta mempengaruhi politik pendidikan Islam pada saat itu.

Pada tanggal 3 Desember 1960 keluar ketetapan MPRS II/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Semesta Berencana, tahapan pertama tahun 1961-1969. Dalam kaitan dengan pendidikan nasional, ketetapan ini antara lain menyebutkan bahwa pada pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah rakyat sampai dengan Universitas, dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid/murid menyatakan keberatan.<sup>27</sup>

Pemerintah Orde Lama berada dalam tiga kekuatan, yaitu nasionalis, sekularis komunis, dan Islamis. Tiga ini seringkali benturan dan saling mengalahkan. Menjelang ahir 60-an Soekarno lebih terjebak ke dalam perangkap kaum sekuler-komunis. Soekarno dituduh berada di belakang G30 S-PKI. Dalam keadaan demikian perhatian Soekarno terhadap pendidikan Islam amat kurang, bahkan umat Islam terpinggirkan, dan banyak sekali tokoh-tokoh Muslim yang dipenjarakan. Dengan demikian politik pendidikan Islam lebih diarahkan pada upaya membendung paham komunis.

## 3. Kebijakan politik pemerintah pada masa Orde Baru

Dimulai dari tahun 1966, masyarakatnya memiliki karakter sebagai berikut:

- a. Lemah jika berhadapan dengan kekuasaan pemerintah,
- b. Tidak mampu mengakulturasikan dirinya ke dalam kekuatan politik, ekonomi, hukum, sehingga terlibat bersama-sama,
- c. Mengalami fragmentasi baik kultural maupun struktural.

---

27 Ali Hasan, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 2003), 52.

Dari uraian tersebut, terlihat fenomena terjadinya perbedaan yang mencolok antar kebijakan politik pemerintah bersifat refresifdominatif. Kebijakan politik pemerintah yang berupa peraturan perundangan selama masa Orde Baru bukanya meningkatkan, akan tetapi sebaliknya mengkerdikan aktivitas politik masyarakat, sehingga menjadi tidak berdaya sama sekali.<sup>28</sup>

Berdasarkan pada konsep politik yang diterapkan itu, maka politik pendidikan pada pemerintahan Orde Baru mengacu kepada Garis-garis Haluan mulai diberlakukan sejak 1973-1988. Sedangkan awal Orde baru berdasarkan ketetapan MPRS/No. XXVII/MPRS/1966 yang secara umum tujuan pendidikan pada masa Orde Baru adalah untuk membentuk manusia yang berjiwa pancasila, cerdas, terampil, dan berbudi pekerti luhur serta berkepribadian Indonesia yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan.<sup>29</sup> Permasalahan yang dihadapi Orde dalam bidang pendidikan diantaranya adalah masalah pemerataan, peningkatan kualitas, afektifitas dan efisiensi, dan relevansi pendidikan dengan pembangunan nasional. Ke empat masalah ini oleh pemerintah Orde Baru ditangani dan diselesaikan dengan berbagai upaya yang selanjutnya dikenal dengan kebijakan pendidikan. Kebijakan tersebut adalah:

- a. Melanjutkan program pemberantasan buta huruf, kemudian pada tahun 1972 dikembangkan memberikan keterampilan tertentu.
- b. Melaksanakan pendidikan agar masyarakat memiliki kemampuan mental, spiritual.
- c. Mengenalkan pendidikan luar sekolah yang berorientasi kepada hal-hal yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, budaya.
- d. Mengenalkan inovasi pendidikan, misalnya Kuliah Kerja Nyata (KKN).
- e. Pembinaan generasi muda melalui Organisasi Intra Sekolah.
- f. Dilaksanakannya program orang tua asuh mulai 1984.

Kaitanya dengan pendidikan agama, ketetapan itu memberi status bahwa pendidikan agama Islam menjadi mata pelajaran wajib yang harus diikuti semua siswa dan mahasiswa serta menjadi syarat kelulusan ujian

---

28 Ibid., 17.

29 Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1985), 81-82.

ahir. Sebagai efek dari ketetapan MPRS No. XXVII/1966, pada tahun 1967 Menteri Agama mengeluarkan kebijakan untuk menegerikan sejumlah Madrasah dalam semua tingkat dari tingkat ibtidaiyah sampai Aliyah.<sup>30</sup> Upaya-upaya di atas merupakan kebijakan pendidikan pemerintah Orde Baru yang dicanangkan secara Nasional. Alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sangat minim dalam bidang pendidikan menjadikan pendidikan sebagai sektor yang lemah dan terasa sulit untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.<sup>31</sup>

Pada sekitar tahun 1970-an baru mulai adanya perhatian pemerintah yang ditujukan untuk pembinaan madrasah, misalnya dengan lahirnya SKB 3 Menteri tahun 1975 antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah, yang disusul dengan SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984 tentang pengaturan pembakuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah. Sejak saat itu madrasah memasuki mainstream pendidikan nasional.<sup>32</sup>

Sehubungan dengan hal di atas pemerintah Orde Baru menggiring politik pendidikannya pada sistem sentralistik.<sup>33</sup> Jadi politik pendidikan Orde Baru tidak jauh berbeda dengan kebijakan politiknya. Bila kebijakan di bidang politik ini sangat melemahkan umat Islam, dengan demikian bahwa kebijakan politik suatu Negara sangat mempengaruhi politik pendidikannya.<sup>34</sup> Meskipun secara politik kurang memberikan tempat pada pengembangan agama, akan tetapi pada Orde Baru ini sangat mempertimbangkan pentingnya agama sebagai kekuatan moral dan spiritual.<sup>35</sup>

#### 4. Kebijakan politik pemerintah Indonesia pada masa Reformasi

Pemerintahan reformasi ini ditandai oleh semakin berkembangnya wacana demokrasi. Namun berbagai kebijakan yang ada di Orde Baru

---

30 Ali Hasan, *Kapita Selekta.*, 53.

31 Abuddin Nata, *Manajemen.*, 18.

32 Ibid., 155.

33 Mashutu, *Pendidikan Indoneia Menyongsong Indonesia Baru Pasca Orde Baru*" dalam *Gema Jurnal Pendidikan*, Edisi 1 Agustus, 1999, 17-18.

34 Abuddin Nata, *Manajemen.*, 18.

35 Ali Hasan, *Kapita Selekta.*, 53.

baru belum seluruhnya dihapus. Sentralisasi pendidikan seperti dalam hal kurikulum, ujian, akreditasi, anggaran dan berbagai aturan belum jauh berbeda dengan masa Orde Baru. Berbagai kondisi perpolitikan pemerintah sebagaimana tersebut di atas, tampak bahwa pendidikan Islam dalam perjalanannya mengalami hambatan, tantangan, dan harapan. Sepanjang Sejarahnya pendidikan Islam mengawal dan mengiringi perjalanan pendidikan nasional. Puncak dari pengakuan pemerintah terhadap eksistensi pendidikan Islam terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional sebagaimana dikehendaki UUD 1945. UU tersebut mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional.<sup>36</sup>

### **Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Sejak kedatangannya ke Indonesia, para penyiar Islam awal di Indonesia telah menggunakan media dakwah dan pendidikan sebagai sarana penyebarannya. Dalam proses sosialisasi mengenai Islam melalui pendidikan tersebut, selain dilakukan oleh masyarakat, juga dilakukan oleh pemerintah. Pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu akhirnya terjadi saling mempengaruhi. Di satu sisi, pemerintah dipengaruhi oleh corak dari lulusan pendidikan tersebut dan disisi yang lain, pemerintah juga mempengaruhi. Corak pendidikan, arah dan tujuannya selanjutnya ditentukan oleh pemerintah. Dalam kaitan dengan ini maka muncullah apa yang dimaksud dengan politik pendidikan.<sup>37</sup>

Sistem politik yang berlaku dalam suatu Negara senantiasa terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat Negara termasuk kebijakan pendidikannya.<sup>38</sup> Politik pendidikan yang diterapkan pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah. Setiap kebijakan pemerintah yang dikeluarkan akan selalu berdasar dan mengacu pada rel politik yang telah ditetapkan. Kebijakan

36 Hasbullah, *Sejarah Pendidikan.*, 81-82.

37 Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 7.

38 Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia Proses, Produk dan Masa Depannya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 20.

tersebut meliputi ke arah mana pendidikan akan dibawa dan untuk tujuan apa pendidikan itu dilaksanakan. Dengan kenyataan seperti ini maka manajemen yang dilaksanakan di sebuah satuan pendidikan harus tetap mengacu pada kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengacu pada politik pemerintah dalam bidang pendidikan tadi.

Tentu saja politik pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia berubah seiring perubahan kekuasaan atau orde yang memerintah maupun kebutuhan sosiologis masyarakat pendidikan Indonesia. Oleh karena itu dalam realitasnya tak ada Negara yang tidak ikut campur urusan pendidikan warga negaranya. Oleh karena itu tak jarang dalam dunia pendidikan kemudian timbul konflik kepentingan antara masyarakat dan pemerintah. Di satu sisi, masyarakat bertekad untuk mewariskan kepentingan-kepentingannya sendiri pada generasinya, sementara disisi lain, pemerintah juga berkepentingan untuk mendidik rakyatnya sesuai dengan kepentingan pemerintah.

Pendidikan Islam merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di Indonesia sebelum pemerintah kolonial memperkenalkan sekolah. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan Islam tidak serta merta dimasukkan di dalam sistem pendidikan nasional. Organisasi pendidikan Islam memang terus hidup dan berkembang namun tidak memperoleh perhatian sepenuhnya dari pemerintah. Lembaga-lembaga pendidikan Islam dibiarkan hidup meskipun dalam keadaan yang sangat sederhana.<sup>39</sup>

Pada sekitar tahun 1946, Departemen Agama telah meletakkan cita-cita pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi pendidikan nasional, khususnya pendidikan keagamaan.<sup>40</sup> Pada sekitar tahun 1970-an baru mulai adanya perhatian pemerintah yang ditujukan untuk pembinaan madrasah, misalnya dengan lahirnya SKB 3 Menteri tahun 1975 antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah, yang disusul dengan SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984 tentang pengaturan pembakuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah. Sejak saat itu madrasah memasuki mainstream pendidikan nasional.<sup>41</sup>

---

39 Hasbullah, *Otonomi Pendidikan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 153-154.

40 Ibid., 154.

41 Ibid., 155.

Pengakuan secara yuridis terhadap kelembagaan pendidikan Islam dengan ciri khasnya baru dapat dilihat dengan kehadiran UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU tersebut, pendidikan madrasah diakui sebagai subsistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, dan PP No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.<sup>42</sup> Puncak dari pengakuan pemerintah terhadap eksistensi pendidikan Islam terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional sebagaimana dikehendaki UUD 1945. UU tersebut mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional.<sup>43</sup>

Pasal 15 UU Sisdiknas menyatakan bahwa pendidikan keagamaan secara beruntun dengan pendidikan umum, pendidikan agama sejajar dengan pendidikan lainnya. Sehingga, peserta didik memiliki status sederajat dengan lulusan pendidikan umum formal.<sup>44</sup>

Lingkup pendidikan agama Islam:

1. Pendidikan agama di sekolah
2. Pendidikan umum berciri Islam, yang terdiri dari:
  - a. Madrasah
  - b. Sekolah Islam
3. Pendidikan keagamaan (diniyah dan pesantren), baik jalur formal, non formal maupun informal.

### **Hubungan Manajemen, Politik dan Pendidikan Islam di Indonesia**

Dalam kenyataan hidup organisasi dan atau kelembagaan, tampaknya tidak lepas dari aspek politis. Dalam tataran birokrasi negara, implementasi teori manajemen yang penuh idealitas telah terwarnai oleh kehidupan politis. Hal ini berlaku pula dalam dunia pendidikan. Nata mengemukakan bahwa, sebuah pemerintah Negara dalam berkomunikasi dengan rakyatnya

---

42 Ibid., 156.

43 Ibid., 157.

44 Departemen Agama RI., *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional* (Jakarta: Departemen Agama), 7-8.

biasanya menggunakan berbagai kebijakan. Kebijakan inilah yang kemudian dilaksanakan oleh seluruh abdi Negara dan masyarakat sesuai dengan bidangnya termasuk pendidikan.<sup>45</sup> Sejalan dengan itu, Freire berpendapat masalah pendidikan tidak mungkin dilepaskan dari masalah politik, karena bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan. Hal senada juga dikemukakan oleh Imber dan Geel, bahwasanya antara pemerintah yang demokratis, politik pendidikan, pilihan institusi, dan anti politik berkorelasi dengan tercapainya tujuan pendidikan yang selaras dengan kepentingan publik. Berdasarkan analisis itu, kita bisa belajar bahwa masyarakat modern, institusi pendidikan diharapkan menyelaraskan dengan tujuan dan kepentingan publik, melalui peran serta para pakar pendidikan.

Mengambil kebijakan terkait pendidikan di negeri ini tidak sederhana. Hal itu terkait dengan aspek-aspek sejarah, sosiologis, budaya, politis dan aspek-aspek lainnya yang lebih luas. Selama ini sekalipun terdapat kementerian tersendiri yang mengurus pendidikan, tetapi beberapa kementerian juga menyelenggarakan pendidikan. Sehingga, pengelolaan pendidikan tidak hanya diurus oleh Kementerian Pendidikan Nasional, melainkan juga kementerian lain. Tidak kurang dari 20 % lembaga pendidikan di Tanah Air ini diurus oleh Kementerian Agama. Demikian pula kementerian lainnya, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan dan Keamanan, sekalipun tidak sebanyak yang diurus oleh Kementerian Agama, juga menyelenggarakan pendidikan sendiri. Kenyataan itu ada tidak lepas dari persoalan sejarah dan mungkin juga politik.<sup>46</sup>

Penyelenggaraan pendidikan semakin lebih kompleks sehubungan adanya partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya dalam mengelola pendidikan. Sebagai akibat pemerintah belum mampu menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan, maka masyarakat pun menyelenggarakan pendidikan, mulai penyelenggaraan pendidikan tingkat dasar, bahkan PAUD, hingga pendidikan tinggi. Atas dasar kenyataan itu, maka muncul pendidikan yang berstatus negeri dan pendidikan swasta.<sup>47</sup> Penyelenggaraan pendidikan seperti

---

45 Abuddin Nata, *Manajemen.*, 10.

46 Imam Suprayogo, *Kebijakan dan Politik Pendidikan*. Artikel. Diakses 20 Oktober 2010

47 Ibid.

itu akan berpengaruh terhadap alokasi pendanaan, pengawasan mutu, manajemen, organisasi, dan aspek lain yang lebih luas. Jika pada akhir-akhir ini muncul isu adanya penyimpangan pendidikan, seperti misalnya ditemukan ijazah palsu, mutu pendidikan yang terlalu rendah dan lain-lain, maka itu semua adalah sebagai risiko atau konsekuensi dari penyelenggaraan pendidikan yang seperti digambarkan itu.<sup>48</sup>

## **Penutup**

Manajemen ialah: proses merencana, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan supaya organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Politik Pendidikan adalah segala urusan dan tindakan, kebijaksanaan, siasat dan sebagainya, mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain. Kebijakan pendidikan adalah apa yang dikatakan (diputuskan) dan dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan. Kebijakan politik pemerintahan di Indonesia secara umum dapat dibagi ke dalam empat periode:

1. Kebijakan politik pemerintah Indonesia pada masa Pra-kemerdekaan,
2. Kebijakan politik pemerintah Indonesia pada masa Orde Lama,
3. Kebijakan politik pemerintah pada masa Orde Baru,
4. Kebijakan politik pemerintah Indonesia pada masa Reformasi.

Kedudukan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional UU Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas. Pendidikan Islam diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional. Hubungan antara manajemen, politik, dan kebijakan dalam pendidikan khususnya pendidikan Islam saling terkait antara satu dengan yang lain. Setiap kebijakan mengenai pendidikan pasti ada unsur politik yang mengiringinya. Demikian pula kebijakan yang di ambil oleh pemerintah membutuhkan manajemen yang komprehensif agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Ringkasnya; bahwa antara manajemen, politik dan pendidikan khususnya pendidikan Islam saling terkait antara satu dengan yang lain. Setiap kebijakan mengenai pendidikan pasti ada unsur politik yang mengiringinya. Demikian pula kebijakan yang di ambil oleh pemerintah membutuhkan manajemen yang komprehensif agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

---

48 Ibid.

## DAFTAR PUSTAKA

- Depag. *Al-Qur'an al-karim dan terjemah Bahasa Indonesia*. Semarang: Menara Kudus, 2006.
- Departemen Agama RI. *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Agama, t.t.
- Effendy, Ek. Mochtar. *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*. Jakarta: PT Bhratara Karya Aksara, 2008.
- Fattah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Hasan, Ali. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2003.
- Hasbullah. *Otonomi Pendidikan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Imron, Ali. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Imron, dkk. *Manajemen Pendidikan Analisis dan Aplikasinya dalam Institusi Pendidikan*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2003.
- Muhadjir, Noeng. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993.
- Nata, Abuddin. *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Poerdarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Saliba, Jamil. *Mu'jam al-falsafi*. Mesir: Dar al-Fikr, 1978.
- Sirozi, M. *Politik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Shadily, John M. Echols. *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1980.
- Sudirman, dkk. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Remaja Karya, 1989.
- [www.Analisis Kebijakan Pendidikan.com](http://www.AnalisisKebijakanPendidikan.com) diakses 20 September 2010.
- [www.Kebijakan-kebijakan Pendidikan .com](http://www.Kebijakan-kebijakanPendidikan.com) diakses 20 Oktober 2010.

